



PNPM-MP Digelontor Rp5 Miliar

YOGYAKARTA – Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) senilai Rp5,4 miliar pada 2014 siap digelontorkan kepada seluruh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kota Yogyakarta. Bantuan langsung masyarakat (BLM) tersebut diserahkan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono kepada BKM, kemarin.

Satuan Kerja PNPM-MP Kota Yogyakarta Hendra Tantular mengatakan, alokasi anggaran yang diberikan tahun ini sama dengan yang diterima tahun lalu. Distribusi alokasi anggaran untuk setiap wilayah kelurahan juga memiliki besaran tetap.

“Alokasi dana tahun ini sama dengan tahun lalu di mana 95% anggarannya berasal dari APBN. Sementara untuk dana pendampingannya dari APBD Kota Rp273 juta,” katanya sesuai simbolisasi penyerahan dana oleh Pemkot Yogyakarta ke BKM 45 kelurahan, kemarin.

Hendra yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta tersebut mengatakan, untuk Kota Yogyakarta sebagian besar penggunaan dana untuk kegiatan fisik lingkungan. Sementara untuk kegiatan sosial pelatihan dan ekonomi keuangan

“Alokasi dana tahun ini sama dengan tahun lalu di mana 95% anggarannya berasal dari APBN.”

HENDRA TANTULAR
 Satuan Kerja PNPM-MP
 Kota Yogyakarta

an cenderung mendapatkan porsi yang lebih kecil.

Bahkan dari catatannya, untuk ekonomi keuangan banyak yang mengalami kemacetan sehingga BKM tidak bisa mendapatkan kesempatan melaksanakan program simpan pinjam. “Simpan pinjam ini sudah kami upayakan untuk dilakukan pemutihan ke Jakarta, tapi sampai saat ini masih belum dapat disetujui,” kata Hendra.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, proses penyaluran dana PNPM-MP 2014 Kota Yogyakarta diawali dengan penyusunan program oleh BKM di masing-masing kelurahan. Setelah itu, pencairan dana tahap pertama akan dilakukan April mendatang langsung ke rekening masing-masing BKM sebesar 60%.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono mengatakan, ada tiga kunci pokok pelaksanaan

PNPM-MP. Untuk pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan jika iklim transparansi di semua tingkat, baik pemerintah maupun masyarakat, terpenuhi.

Kemudian mendorong penguatan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat, dan akuntabilitas publik sebagai prinsip konsistensi dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan dan program yang dilakukan. “Harapannya, penerapan ketiga prinsip ini, program penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada *Community Based Development* (CBD) dapat terus sejalan dengan target pencapaian tujuan pembangunan,” katanya.

Dengan sistem yang disusun, diharapkan program PNPM-MP dapat mendorong kemampuan mengurangi angka kemiskinan hingga 15% di 2015 mendatang. Target tersebut sesuai dengan harapan tercapainya MDG's pada 2015 mendatang.

Penurunan angka kemiskinan, menurut Imam, dapat terpenuhi jika program PNPM-MP yang dilakukan BKM dapat bekerja tepat sasaran, efisien, dan efektif. “Yang sangat diharapkan dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat miskin adalah pembangunan yang tepat sasaran,” tandasnya.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005